



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah 2026

Rencana Kerja (Renja) SKPD
merupakan **dokumen perencanaan SKPD** untuk
periode 1 (satu) tahun.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/252/Bappeda-G. ST/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta adanya perubahan kebijakan nasional/daerah, kondisi dan kebutuhan pembangunan, serta penyesuaian anggaran, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

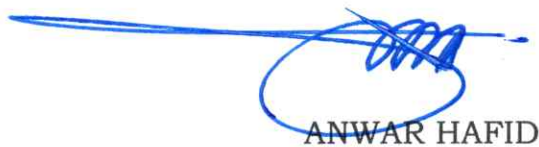
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 000.7.2/252/Bappeda-9.9/2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Perubahan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Perubahan Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATAPENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RENJA akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang penganggarannya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tanggal 17 Desember 2021 tentang tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Sulawesi Tengah. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD)2025-2045.

Terkait hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 sesuai yang diamanatkan dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Musrenbang-RKPD mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Atas tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya.

Palu, 06 Oktober 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulanagan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



D. H. H. IS. ATTAH YUNUS, MM

Pemula Muda

Nip. 19671026 199403 1 008

DAFTARISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud danTujuan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 22	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Provinsi SulawesiTengah	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	29
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATANDAN PENDANAAN	37
BABV PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Renja merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja secara spesifik belandaskan pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tolok ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 1 (satu) tahun.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
2. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.
4. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Program/Kegiatan/Subkegiatan.

Renja pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Maksud dan tujuan;
- 1.3. Landasan hukum, dan
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Capaian Rencana Strategis
tahun2024**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun lalu,dan realisasi rencana strategis perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana dan/atau realisasi APBD. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. Faktor penyebab tidak terpenuhinya capaian program/kegiatan antara lain :
 1. Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan)
 2. Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
 3. Belum maksimalnya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
 4. Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 1. Melakukan perencanaan teknis secara matang sesuai kondisi dan situasi yang terjadi.
 2. Penyusunan target kinerja yang mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta mengantisipasi segala hambatan yang mungkin timbul dalam mencapai sasaran.
 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik bersama seluruh stakeholder.
 4. Penganggaran berdasarkan urgensi program/kegiatan yang berada pada daerah kewenangan provinsi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan bencana daerah s/d Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Reallisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	60	100	100	100			
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</i>	nilai							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2			100	2	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA[1]SKP	Dokumen	3	1	1	100	3	-	-
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah</i>	100%				100		-	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	12	12	12	100	12	-	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Org/bln	12	12	12	100	12		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5	5	100	5		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Reallisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2	2	100	2		
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan</i>	%		100					
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	2	2	100	2	-	-
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI</i>	%		100					
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pket		1	1	100	1		
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota		13	13	100	13		
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI</i>	%		100		100		-	-
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		3	3	100	3		
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>nilai hasil kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM</i>	%		100	1	100		-	-
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		12	12	100	12	-	-
13.	Penyediaan Jasa pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Paket		1	1	100	1	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Reallisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%		100		100		-	-
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14	14	100	14	-	-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Kab/Kota							
h.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab/Kota	100%	2		-		-	-
15.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Dokumen		2	2	100	1	-	-
16.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Peserta		50	50	100	30	-	-
i.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Kab/Kota	4 kwsn			100		-	-
17.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang	Dokumen		1	1	100	4	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Reallisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
		dilegalisasi								
18.	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab/org		/50	50	100	115		
20.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab/Lokasi/Org		4 Kab/14 Lokasi/40 orang	4 Kab/14 Lokasi/40 orang	100	15 Lokasi		
21.	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RP3) yang disusun	Kab		2	2	100	2		
j.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	Kab/Kota	100%						
23.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kali		28	28	100	13 Kab/Kota	-	-
25.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paket		4	4	100	1	-	-
k.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana	Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat	Kab/Kota	100%					-	-
26.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		1	1	100	1 laporan	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Reallisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
	Penguatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata kelola kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen		1	1	100	1 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2. 1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	12.144.556.357,71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	12.144.556.357,71	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</i>	78	54.479.062,83	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</i>	78	54.479.062,83	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen PerencanaaN Perangkat Daerah	2 Dok	16.706.234,83	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen PerencanaaN Perangkat Daerah	2 Dok	16.706.234,83	

	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	15.376.300,00	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	15.376.300,00	
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	palu	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Lap	9.385.250,00	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	palu	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Lap	9.385.250,00	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	palu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Data	13.011.278,00	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	palu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Data	13.011.278,00	

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah</i>	100	11.347.567.784,88	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah</i>	100	11.347.567.784,88	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org	11.034.950.984,88	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org	11.034.950.984,88	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	185.978.300,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	185.978.300,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dok	109.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dok	109.200.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	palu	jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	17.438.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	palu	jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	17.438.500,00	

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	100	18.302.850,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	100	18.302.850,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	palu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 2 Dokumen 100% Milik Daerah pada SKPD	2 lap	18.302.850,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	palu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 2 Dokumen 100% Milik Daerah pada SKPD	2 lap	18.302.850,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	50	294.760.750,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	50	294.760.750,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.154.750,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.154.750,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	206.606.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	206.606.000,00

5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SPSE</i>	50	81.265.510,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SPSE</i>	50	81.265.510,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	palu	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	81.265.510,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	palu	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	81.265.510,00	

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPemerintah Daerah		<i>nilai hasil kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM</i>	60	238.120.400,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPemerintah Daerah		<i>nilai hasil kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM</i>	60	238.120.400,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	palu	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	4.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	palu	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	4.200.000,00	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	233.920.400,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	233.920.400,00	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	110.060.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	110.060.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralataan dan mesin lainnya	palu	Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	110.060.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralataan dan mesin lainnya	palu	Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	110.060.000,00	

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	20%	2.132.839.250,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	20%	2.132.839.250,00
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	
			Persentase penanganan pasca bencana	100%				Persentase penanganan pasca bencana	100%	
8	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	20	189.254.600	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	20	189.254.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dok	79.801.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dok	79.801.000

	Sub Kegiatan Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	kab/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	390 org	109.453.600	Sub Kegiatan Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	kab/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	390 org	109.453.600	
--	---	----------	--	---------	-------------	---	----------	--	---------	-------------	--

9	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	4 kws	1.213.849.800,00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	4 kws	1.213.849.800,00	
---	--	--	--	-------	------------------	--	--	--	-------	------------------	--

Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	kab/kota	jumlah laporan yang memuat kawasan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan -kawasan strategis Keb/Kotayang memiliki mekanisme dan prosedur tetap Kesiapsiagaan	13 kws	1.195.364.500	Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	kab/kota	jumlah laporan yang memuat kawasan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan -kawasan strategis Keb/Kotayang memiliki mekanisme dan prosedur tetap Kesiapsiagaan	13 kws	1.195.364.500
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	4 dok	8.463.600,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	4 dok	8.463.600,00
Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kab/kota	jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kab/Kota yang meningkat kemampuan dan keterampilan dalam	390 org	10.021.700	Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kab/kota	jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kab/Kota yang meningkat kemampuan dan keterampilan dalam	390 org+	10.021.700

			pencegahan dan mitigasi bencana					pencegahan dan mitigasi bencana			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

10	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	100	617.534.100,00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	100	617.534.100,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	kab/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 org	534.680.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	kab/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 org	534.680.800,00	
	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	kab/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat	1 Lap	82.853.300,00	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	kab/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat	1 Lap	82.853.300,00	

			Penanganan Darurat Bencana					Penanganan Darurat Bencana			
11	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat	100	112.200.750,00	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat	100	112.200.750,00	
	koordinasi penanganan pasca bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 keg	71.497.000,00	koordinasi penanganan pasca bencana Provinsi	kab/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 keg	71.497.000,00	
	Penguatan Kelembagaan Bencana	kab/kota	(Jumlah Dokumen yang dilegalkan)	1 dok	38.263.050	Penguatan Kelembagaan Bencana	kab/kota	(Jumlah Dokumen yang dilegalkan)	1 dok	38.263.050	

	Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota	kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	13 kab/kota	2.440.700	Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota	kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	13 kab/kota	2.440.700	
	Jumlah				14.277.395.607,71	Jumlah				14.277.395.607,71	

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Secara Nasional penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Arah kebijakan dan strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah disinkronisasikan dengan arah kebijakan dan strategi daerah dibidang penanggulangan bencana, maka telaah kebijakan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana tahun anggaran 2026 adalah:

- 1) Mengurangi resiko bencana
- 2) Memberikan jaminan perlindungan social korban bencana
- 3) Menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu
- 4) Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi.
- 5) Menyiapkan logistik dan peralatan.
- 6) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi

Pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya sangat cepat, terkadang menimbulkan konflik lahan yang berakhir dengan konflik sosial, padahal dibalik semua itu ada suatu masalah besar yang timbul yaitu Daerah Rawan Bencana, dari berbagai kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa wilayah mempunyai potensi ancaman bencana yang pada hakekatnya semua jenis bencana tersebut dapat disebabkan oleh alam dan non alam serta

bencana karena ulah manusia (sosial). Hal tersebut biasanya mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis bagi masyarakat korban bencana. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) ketika terjadi bencana (saat bencana) dan sesudah terjadi bencana (pascabencana) maupun bencana yang potensial terjadi dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 maka BPBD Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui peningkatan peran koordinasi dan mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah secara mutlak harus bersinergi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta target makro daerah. Sinkronisasi ini menjadi krusial mengingat wilayah Sulawesi Tengah secara geopolitis memiliki tingkat kerawanan bencana geologi (gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gerakan tanah) dan hidrometeorologi (banjir, karhutla) yang sangat tinggi.

Dalam konteks makro, penelaahan kebijakan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang mengusung tema strategis

"Berani Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"

Tema pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan produktivitas pertanian/industri tersebut tidak akan dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa adanya jaminan stabilitas daerah dari dampak bencana (Resiliensi Daerah). Oleh karena itu, isu "Ketahanan Iklim dan Kebencanaan" diposisikan sebagai salah satu isu strategis utama dalam struktur perencanaan daerah.

Penyelarasan kebijakan BPBD terhadap prioritas nasional dan daerah difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana serta penguatan ketangguhan daerah melalui langkah-langkah strategis berikut:

- 1. Akselerasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Mengintegrasikan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam tata ruang dan rencana pembangunan untuk meminimalisir Indeks Risiko Bencana daerah**
- 2. Kesiapsiagaan Pasca-Tanggap Darurat: kebijakan jangka pendek difokuskan pada percepatan pendataan kerusakan, penyediaan hunian sementara (huntara), serta pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.**
- 3. Penguatan Sistem Informasi & Digitalisasi Kebencanaan: Mengoptimalkan manajemen data kedaruratan, perluasan cakupan informasi rawan bencana, serta pemanfaatan aplikasi kedaruratan guna mempercepat response time penanganan di lapangan.**
- 4. Kemitraan Pentahelix: Mendorong kolaborasi aktif lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/relawan, dan media massa untuk membangun kemandirian desa/kelurahan**

tangguh bencana.

Melalui penyalarsan ini, seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta kebutuhan pendanaan yang dirumuskan oleh BPBD diarahkan secara linear untuk menurunkan indeks risiko bencana serta melindungi pusat-pusat produktivitas ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rancangan Renja

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD merupakan acuan strategis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Penetapan ini didasarkan pada mandat perlindungan masyarakat dari dampak bencana serta pencapaian target makro daerah :

1. Meningkatnya ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan mutu pelayanan penanggulangan bencana

Adapun sasaran :

- Sasaran 1: Menurunnya nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Daerah ke kategori sedang/rendah
 - Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana.
- 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan mutu pelayanan penanggulangan bencana.
- Sasaran 3: Terpenuhinya target capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana secara optimal.

Indikator Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada R

Renstra Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

3.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana	180,59	178,92	177,24	175, 57	174,88	172, 21
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	indeks ketahanan daerah	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 berdasarkan pada Renstra BPBD tahun 2025 – 2029.

Program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun memiliki 2

program 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Total kebutuhan pagu sebesar Rp. 14.277.395.607,71. 2 program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH URUSAN DAERAH
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk rincian lengkapnya, terdapat pada table 3.2. berikut :

Tabel 3 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 . 01.1.03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		66					
05 . 01.1.03. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		78					
1.05.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Palu	2 Dok	16.706.235	APBD		2 Dok	157.500.000
1.05.01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Palu	2 Dok	15.376.300	APBD		2 Dok	157.500.000
1.05.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang tersusun	Palu	1 Lap	9.385.250	APBD		1 Lap	152.383.692
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Palu	1 Data	13.011.278	APBD		1 data	100.000.000
05 . 01.1.03. 03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah		100					
05 .	Penyediaan Gaji	Jumlah ASN	palu	75 Org	11.034.950.985	APBD	82	1 lap	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutu han Dana/P agu Indika tif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.1.03. 06	dan Tunjangan ASN	yang terbayarkan gaji dan tunjangannya					Org		10.187.362.906
1.05.01. 1.02.02					989.450.0 00	APBD	1 dok		2.300.892.333
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Tambahan Penghasilan	Palu	1 dok					
1.05.01. 1.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah BukuPenatausah aan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD yang Tersusun	Palu	1 Dok	194.396.074	APBD	1 dok		105.000.000
1.05.01. 1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Keuangan SKPD yang tersusun	Kab/Ko ta	2 Lap	17.438.500	APBD		2 lap	105.000.000
1.05.01. 1.06	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan</i>		100%					
1.05.01. 1.06.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah pada OPD yang tersusun	palu	2 lap	18.302. 850	APBD		2 lap	105.000.000
1.05.01. 1.06.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI</i>		50					
1.05.01. 1.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Palu	1 lap	88.154.750	APBD		1 lap	210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		disediakan							
1.05.01. 1.07.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/K ota dan Luar Daerah	13 Kab/ luar daerah	271.976.100	APBD		13 Kab/ luar daerah	230.000.000
1.05.01. 1.07.06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SPSE		50					
1.05.01. 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Palu	2 unit	203.113.369	APBD		2 unit	52.500.000
1.05.01. 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai hasil kepuasaan masyarakat pada aplikasi SKM		60					
1.05.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Palu	1 lap	233.920.400	APBD		1 lap	226.790.760
1.05.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Telpon dan Internet kantor	Palu	1 lap	4.200.000	APBD		1 lap	21.000.000
1.05.01. 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Loka si	Tar get Cap aia n Kin erj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.0 1. 1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Palu	14 unit	110.060.000	APBD		14 unit	105.000.000
	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA								
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		20 %					
1.05.0 3. 1.01. 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		1 Dok	79.801.000	APBD		1 Dok	157.500.000
1.05.0 1. 1.01. 01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat di Kab/kota yang meningkat ketrampilan dan kemampuann ya dalam pencegahan dab mitigasi bencana		390 Org	109.453.600	APBD		390 Orang	157.500.000
1.05.0 1. 1.01. 02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana		4 kwsn					
1.05.0 3. 1.02. 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalkan		1 Dok	8.463.600	APBD		1 Dok	210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.03. 1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Ko ta yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab/ kota	390 Org	10.021.700	APBD		390 Org	105.000.000
1.05.03. 1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Kawasan rawan bencana yang tertangani	Kab/ kota	13 kws	3.443.740.667	APBD		13 kws	157.500.000
1.05.03. 1.02	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi		100%					
1.05.03. 1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana	palu	1 Lap	339.841.400	APBD		1 Lap	315.000.000
1.05.03. 1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	palu	1 lap	534.680.800	APBD		1 lap	444.095.152
1.05.03. 1.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat		100%					
	Koordinasi Penanganan Pasca	Persentase Penyelesaian	Kab/kot a	100 %	981.497.000	APBD		100 %	157.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2027	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Bencana Provinsi	kegiatan pasca bencana disemua sector berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)							
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Jitu Pasna 13 Kab/kota	Kab	1 dok	38.263.050	APBD		1 dokume n	186.823.300
1.05.03. 1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub Urusan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana Kab/kota dalam 1 tahun	Kab	13 kab/ko ta	2.440.700	APBD		13 kab/kot a	210.000.000

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi sebagai upaya untuk mewujudkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan termuat pada dokumen Renstra 2021 – 2026.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
RKPD 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.777.395.608	
						BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18.777.395.608	
1.	1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks reformasi birokrasi	Palu	66	13.220.442.091	
	1	05	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Palu	78	54.479.063	
	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2 Dok	16.706.235	

	1	05	01	1.01	04	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Palu	3 Dok	15.376.300	
	1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	1 Laporan	9.385.250	
	1	05	01	1.01	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Palu	1 Data	13.011.278	
	1	05	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah		100%	12.236.235.559	
	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	75 Orang	11.034.950.985	
	1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	1 Dok	989.450.000	
	1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	5 Dok	144,097,034	
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palu	2 Dok	17.438.500	
	1	05	01	1.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan		100%	18.302.850	
	1	05	01	1.03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab/Kota	2 Lap	18.302.850	
	1	05	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI		50	360.130.850	
	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	1 Paket	88.154.750	

5	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota Luar Daerah	1 Lap	271.976.100	
	1	05	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SPSE		50	203.113.369	
					010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palu	2 Unit	203.113.369	
	1	05	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai hasil kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM		60	238.120.400	
	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	1 Laporan	233.920.400	
					04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	1 Laporan	4.200.000	
	1	05	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100%	110.060.000	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	14 Unit	110.060.000	
	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Palu	20%	5.556.953.517	
							Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Palu	100%		
							Persentase penanganan pasca bencana	Palu	100%		
	1	05	03	1.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%	189.254.600	
					03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi		1 Dokumen	79.801.000	

					04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota		390 Orang	109.453.600	
	1	05	03	1.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana		4 kwsn	3.462.225.967	
					013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau awasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		13 Kawasan	5.152.532.667	
					022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan		1 Dokumen	8.463.600	
					030	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi		390 orang	10.021.700	
	1	05	03	1.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	Kab/Kota	100%	874.522.200	
					028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	1000 orang	287,500,000.00	
					030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kab/Kota	1 Laporan	339.841.400	

	1	05	03	1.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggunan Bencana	Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat		100%	1.022.200.750	
					09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kab/Kota	5 Kegiatan	981.497.000	
					018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang Dilegalkan	Kab/Kota	1 Dokumen	38.263.050	
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	13 Kab/ Kota	2.440.700	

BAB V

PENUTUP

Renja Tahun 2026 ini memuat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra, Pencapaian Kinerja Pelayanan, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 antara lain :

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja
2. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Penyusunan Tahun 2026 ini berpedoman pada Renstra Tahun 2021 – 2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra Tahun 2021 - 2026 telah termuat dalam Renja Tahun 2026.
4. Penyusunan Renja Tahun 2026 ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.
- c. Rencana tindak lanjut.
- Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

